

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Kesepakatan di Sata-saat Akhir

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020 sampai pada tahap akhir. Sejumlah kesepakatan dibuat di saat-saat terakhir sebelum rencananya disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu ini.

Beragam drama mewarnai pembahasan APBD DKI tahun ini. Dari anggaran lem Aica-Aibon, berhentinya dua pejabat Pemprov DKI di tengah kasus anggaran ganjil, hingga Badan Kehormatan DPRD DKI yang menerbitkan rekomendasi sanksi teguran terhadap anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, yang mengungkapkan anggaran ganjil ke publik.

"Bagi saya, sebenarnya pengungkapan anggaran ganjil ke publik itu tak mengganggu, justru membantu kami melakukan penyisiran," kata Iman Satria, Ketua Komisi E di mana anggaran ganjil lem tersebut ditemukan.

Rapat Badan Anggaran terakhir antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta digelar pada Senin (9/12/2019), dari siang hingga malam hari. "Setelah pembahasan lama, ternyata masih ada anggaran yang tak perlu dalam rancangan," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat membuka rapat.

Penambahan dana partai politik dari Rp 2.400 per suara menjadi Rp 5.000 per suara yang dibahas di Komisi A lolos. Tak ada protes dari anggota dewan. Perubahan ini memang diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



Perubahan lain yang dicapai dalam rapat terakhir itu adalah pembangunan SMK Negeri 74 sebesar Rp 106 miliar menjadi SMK negeri berasrama yang akhirnya disepakati ditolak tanpa banyak perdebatan. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan, pembuatan sekolah berasrama tak sesederhana membangun fasilitasnya. Keberadaan sekolah ini dibutuhkan di seluruh wilayah DKI Jakarta, tetapi harus dilengkapi dahulu kurikulum dan kajiannya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefuloh Hidayat mengatakan, usulan untuk SMKN 74 sekitar Rp 106 miliar sudah ada sejak rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Pembangunan SMK berasrama ditujukan bagi warga pesisir dan warga tak mampu untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. "Ini rekomendasi Dewan Riset Daerah DKI," katanya.

Keseruan lain muncul saat membahas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diusulkan menggunakan dana APBD sebesar Rp 19,8 miliar. "Dengan penggunaan dana APBD, perlu ada parameter dan aturan yang harus dipenuhi," kata Pantas Nainggolan dari PDI-P.

"Keberadaan tim ini sudah terbukti sangat baik, termasuk melakukan layanan kesehatan dan bantuan kesehatan untuk warga. Polemik ini sudah berjalan dua tahun, intinya hanya perlu evaluasi saja," kata Syarif dari Partai Gerindra.

Di akhir perdebatan itu, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sepakat memangkas jumlah anggota TGUPP dari 67 orang menjadi 50 orang. Namun, hingga Selasa malam, usulan anggaran tak berubah, masih Rp 19,8 miliar.

Setelah disepakati di tingkat DKI, RAPBD DKI Jakarta 2020 akan diserahkan kepada wasit terakhir, Kementerian Dalam Negeri. (IRENE SARWINDANINGRUM)